

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar. Tantangan *pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai dan mampu meningkatkan kualitas yang lebih baik. *Kedua*, untuk mengantisipasi arus globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu bersaing dalam pasar global. *Ketiga*, dengan diberlakukannya undang-undang otonomisasi daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan mendorong partisipasi masyarakat.

Menjawab tantangan tersebut di atas, Kementerian Pendidikan Nasional dengan dasar Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Permendiknas No. 28 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Renstra Ditjen PAUDNI Tahun 2010-2015, telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain terus mengusahakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta

mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis kebutuhan, lingkungan dan sasaran dunia usaha keseluruhan lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam rangka mengimplementasi kebijakan dibidang pendidikan tersebut, maka melalui jalur pendidikan nonformal telah direncanakan berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya layanan pendidikan kecakapan hidup, sebagai bentuk program yang dapat menyentuh langsung pada pembinaan dan penerapan keterampilan guna kesiapan untuk membangun usaha mandiri atau memasuki dunia usaha.

Pendidikan Non Formal sebagai sub sistem dari pendidikan nasional memiliki akses yang luas dan tanggung jawab besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia terus berupaya dan berusaha mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, sebagai andalan program pendidikan non formal guna melayani kebutuhan belajar masyarakat utamanya yang tergolong kurang mampu, agar mereka memiliki keterampilan dan keahlian (*skill*) yang memadai untuk mengembangkan diri atau siap memasuki dunia usaha.

Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nonformal menyebutkan bahwa kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (PKH) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional (Suryadi, 2007). Sejalan dengan hal itu, maka pembangunan pendidikan non-formal antara lain bertujuan agar: terwujud kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para profesi

yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup (PKH), khususnya bagi penduduk penganggur usia produktif untuk dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional (Suryadi, 2007). Dalam kebijakan ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan kursus diorientasikan pada upaya peningkatan kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 2005-2009 antara lain dinyatakan program kursus dan pendidikan kecakapan hidup (Suryadi, 2007).

Secara umum program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pembinaan sikap dan penerapan keterampilan, di bidang usaha tertentu sesuai dengan bakat dan minat warga belajar sehingga mereka memiliki bekal keterampilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Olehnya program pendidikan kecakapan hidup pada pelaksanaannya lebih diarahkan pada usaha pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan. Sehingga itu dalam pemilihan keterampilan yang akan diterapkan kepada warga belajar didasarkan pada kebutuhan masyarakat , potensi lokal dan kebutuhan dunia usaha.

Penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup lebih diarahkan tanggung jawabnya kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar, serta lembaga yang dikelola langsung oleh masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus , Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat, dan Organisasi Perempuan. Lembaga-lembaga ini diberikan

kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup di masyarakat, berdasarkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Kewenangan yang diberikan kepada unit pelaksana teknis daerah dalam hal ini Sanggar Kegiatan Belajar, perannya sangat besar untuk keberhasilan program kecakapan hidup di masyarakat . Apalagi dengan adanya desentralisasi pendidikan pada era otonomi sekarang ini, sangat memberikan peluang yang cukup signifikan untuk menjadikan program pendidikan kecakapan hidup sebagai program unggulan jalur pembinaan dan pengembangan profesi masyarakat dalam mengikuti berbagai kursus dan pelatihan berdasarkan kebutuhan belajar sebagai bekal memasuki dunia usaha atau dunia industri.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Batudaa Kabupaten Gorontalo telah memprogramkan pendidikan kecakapan hidup sebagai salah satu program utama dengan memberikan sentuhan langsung pada jenis vokasi atau keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun jenis vokasi yang diberikan pada awal program pendidikan kecakapan hidup yaitu keterampilan menjahit, pelatihan perbengkelan las listrik, dan kerajinan tangan kerawang. Jumlah peserta yang mengikuti program tersebut yaitu sebanyak 15 orang untuk vokasi keterampilan menjahit dan kerawang, 10 orang untuk vokasi perbengkelan las listrik. Perekrutan peserta program PKH diutamakan warga belajar Paket B dan Paket C yang telah lulus serta masyarakat berusia 16-35 tahun yang belum memiliki keterampilan dan berminat mengikuti program ini. Program PKH Keterampilan kerajinan tangan kerawang masih

berlangsung, untuk perbengkelan las listrik dan keterampilan menjahit pelaksanaannya sudah selesai tetapi masih dalam tahap pelaksanaan keberlanjutan program yang dikenal dengan prakoperasi. Selama mengikuti program PKH peserta diarahkan oleh instruktur dan pengelola untuk dapat mengelola usaha mandiri dan belajar sesuai dengan lingkungannya

Mengingat SKB Batudaa sebagai lembaga UPTD Diknas Kabupaten Gorontalo yang masih terbilang baru, maka sudah tentunya jika dalam pengelolaan program pendidikan nonformal khususnya pendidikan kecakapan hidup masih ditemukan hambatan-hambatan, dengan kata lain belum optimalnya penyelenggaraan program PKH seperti apa yang diharapkan. Belum optimalnya dimaksud adalah dalam pelaksanaan perencanaan terutama perekrutan instruktur yang ahli dibidang keterampilan yang akan diselenggarakan.

Melihat belum optimalnya pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup di SKB Batudaa, maka peneliti melakukan suatu penelitian ilmiah dengan formulasi judul “Studi tentang Implementasi Pengelolaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) di SKB Batudaa Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup (PKH) di SKB Batudaa Kabupaten Gorontalo sudah optimal?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup (PKH) di Sanggar Kegiatan Belajar Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagi pengelola / penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup (PKH) diharapkan pada penyelenggaraan program kedepan lebih memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam pengendalian program.
- 1.4.2 Bagi pihak lembaga sendiri (SKB Batudaa Kabupaten Gorontalo) hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan bagi penyempurnaan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup dimasa akan datang dalam rangka membina dan mengaktualisasikan modal keterampilan yang diperoleh warga belajar guna kesiapan memasuki dunia kerja atau merintis usaha mandiri.
- 1.4.3 Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu usaha dalam memotivasi kemampuan pribadi untuk membantu penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang lebih optimal dan relevansi dengan perkembangan dunia usaha, serta sebagai dasar untuk terus melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam guna mencapai hasil yang maksimal mewujudkan pengelolaan program pendidikan kecakapan yang optimal dan memiliki nilai-nilai keberhasilan baik bagi masyarakat peserta

didik program pendidikan kecakapan hidup maupun pihak lembaga sebagai penyelenggara program.